

Petani Tambak Udang di Kawasan Pesisir Pantai Kabupaten Sumenep

Shrimp Farmers in the Coastal Area of Sumenep Regency

Sindi Arista Rahman¹, Syamsul Arifin², Fatmawati¹, Zarnuji³, Ribut Santoso¹

¹Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja

²Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja

³Program Studi Design Komunikasi Visual Fakultas Ilmu Administrasi dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja

*Email: sindi.a.rahman@wiraraja.ac.id

(Diterima 16-12-2024; Disetujui 23-01-2025)

ABSTRAK

Penerapan model konvergensi dalam penyusunan kebijakan penataan petani tambak udang di kawasan pesisir tambak udang bertujuan untuk menciptakan penyatuan persepsi, mencapai kesepakatan serta untuk menciptakan tindakan bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat. Penelitian ini menggunakan kaidah kualitatif dengan metode wawancara kepada 10 informan yang masing-masing informan diajukan 8 pertanyaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dialog yang setara dan terbuka merupakan sarana bagi pemerintah dan masyarakat untuk terlibat dalam proses konvergensi kebijakan yang lebih manusiawi dan responsif. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan adalah elemen fundamental dalam model konvergensi kebijakan yang memungkinkan kebijakan lebih efektif dan diterima oleh masyarakat, Penyatuan persepsi dalam model konvergensi kebijakan adalah upaya untuk mengharmonisasi pemahaman antara pemerintah dan masyarakat.

Kata Kunci: Model Konvergensi, Penyusunan Kebijakan, Petani Tambak Udang

ABSTRACT

The application of the convergence model in formulating policies for structuring shrimp farmers in coastal areas aims to create unified perceptions, achieve consensus, and foster collaborative actions between the government and the community. This study employs a qualitative approach, conducting interviews with 10 informants, each asked 8 questions. The findings indicate that equal and open dialogue serves as a medium for both government and community engagement in a more humane and responsive policy convergence process. Active community participation in decision-making is a fundamental element in the convergence model, enabling policies to be more effective and accepted by the community. The alignment of perceptions within the convergence model represents an effort to harmonize understanding between the government and the community.

Keywords: Convergence Model, Policy Formulation, Shrimp Farmers

PENDAHULUAN

Sepanjang Pesisir pantai utara Kabupaten Sumenep berdiri tambak udang yang dikelola oleh perusahaan swasta maupun perorangan. Sejak 2016 pembangunan tambak udang terjadi dalam skala yang besar sehingga menimbulkan berbagai permasalahan misalnya tentang proses peralihan kepemilikan tanah oleh perusahaan-perusahaan atau investor yang dilakukan melalui intimidasi kepada masyarakat lokal karena tidak bersedia menjual lahannya. Dalam rangka mewujudkan keinginannya untuk menguasai tanah milik masyarakat lokal, para investor juga menghasut oknum pemerintah desa (Wardana, 2020).

Isu peralihan fungsi tanah produktif menjadi lahan tambak juga mewarnai kegiatan tambak udang di suemenep. Sebagaimana yang terjadi di desa Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, sekitar 20 Ha tanah merupakan murni tanah pertanian yang sangat produktif, yang mana sebelum dibangun tambak pemilikannya menanam padi, paloiyo dan lainnya (Murthadho, 2021). Di desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten sumenep juga terjadi peralihan lahan produktif pertanian menjadi lahan

tambak udang, padahal secara histori, perekonomian masyarakat sumenep tidak bisa dilepaskan dari kegiatan agraris (Wardana, 2020).

Selain itu, pencemaran lingkungan akibat limbah tambak udang di pesisir pantai kabupaten sumenep tidak luput dari perhatian. Pencemaran air laut di pesisir pantai lombeng oleh limbah cair tambak udang menimbulkan bau yang tidak sedap serta lingkungan menjadi kotor dan tidak bersih serta menyebabkan terjadinya perubahan warna laut yang menjadi kuning kecoklatan (Isman et al., 2022). adanya tambak udang yaitu dampak ekologis yang mengganggu biota laut, selain itu mempersulit masyarakat untuk mencari ikan, karena air laut kotor (Hidayatillah, 2017).

Sejumlah masalah tersebut terjadi karena disebabkan rendahnya tingkat kesadaran, pengetahuan dan kepedulian pengelola tambak udang. Dari sekian alasan tersebut, tingkat kepedulian menjadi salah satu yang utama sehingga cenderung terjadi pembiaran terhadap masalah-masalah yang ada. Oleh karena itu, pendekatan *Convergence* sebagai model yang dapat diterapkan dalam penyusunan kebijakan penataan petani tambak udang dikawasan pesisir pantai Kabupaten Sumenep, hal ini karena Model Komunikasi konvergensi dapat mengembangkan hubungan interpersonal yang menguntungkan, menciptakan percakapan yang mengalir lancar, atau memengaruhi orang lain (Puri et al., 2022).

Kajian pembangunan kebijakan dengan pendekatan *convergence* tidak banyak dilakukan, justru penelitian dengan pendekatan *convergence* telah banyak dilakukan dalam beberapa bidang diantaranya dalam bidang komputer dimana konvergensi digunakan sebagai pendekatan dalam penggabungan teknologi antara telepon, internet, dan media penyiaran untuk menciptakan layanan yang lebih terpadu (Lin et al., 2024). Dalam bidang kesehatan, *convergence* digunakan untuk mengkaji teknologi informasi dengan teknologi medis telah menghasilkan perkembangan yang signifikan dalam diagnosis, pengobatan, dan manajemen penyakit (Kim et al., 2020). Pada bidang otomotif, *convergence* membawa kemajuan besar dalam pengembangan mobil otonom, serta sistem transportasi (Singh, 2023). Dalam bidang keuangan Konvergensi antara teknologi informasi dan sektor keuangan telah menghasilkan inovasi seperti teknologi blockchain, layanan perbankan digital, dan pembayaran digital yang memudahkan akses ke layanan keuangan (Abad-segura et al., 2020). Termasuk dalam kajian e-commerce dimana Konvergensi teknologi informasi dengan perdagangan elektronik telah mengubah cara orang berbelanja dan menjual barang (Saryani et al., 2022).

Oleh karena itu, penelitian penerapan *convergence* dalam penyusunan kebijakan penataan petani tambak udang dikawasan pesisir pantai ini merupakan yang paling awal dilakukan. Konvergensi dilakukan untuk memastikan adanya sinergi antara pemerintah dengan masyarakat (Shofa & Khamidah, 2023). Sejalan dengan itu, bahwa konvergensi sebagai pendekatan dalam penyusunan kebijakan penting dilakukan (Baarsch et al., 2020), hal ini sebagai kebaruan (*novelty*) yang dapat membentuk penyatuan persepsi, mencapai kesepakatan serta tindakan bersama untuk mencegah terjadinya dampak pembangunan tambak udang yang lebih parah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana kualitatif adalah berkaitan dengan usaha menjelaskan fenomena sosial (Maxwel, 2020). Penelitian kualitatif merupakan cara yang paling penting dalam menemukan sebab akibat (Moretti et al., 2011). Menurut busetto et al., (2020) penelitian kualitatif meliputi data yang berbentuk kata-kata. Pada penelitian ini juga metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Wawancara secara garis besar didefinisikan sebagai interaksi antara dua orang pada suatu kesempatan tertentu, di mana satu orang berperan sebagai pewawancara dan yang lain sebagai narasumber (Ruslin et al., 2022). Jumlah informan yang diwawancarai sebanyak 10 orang yang masing-masing Informan terdiri dari masyarakat 5 orang petani tambak udang dan 5 orang dari dinas lingkungan hidup Kabupaten Sumenep dengan kriteria masing-masing sudah bekerja lebih dari dua tahun terakhir. Setiap informan diajukan 8 pertanyaan yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode tematik untuk memastikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan objektif kajian. Penelitian ini bertujuan untuk mendorong penyusunan kebijakan penataan tambak udang di kawasan pesisir Kabupaten Sumenep melalui pendekatan konvergensi. Pendekatan ini

diharapkan dapat menciptakan penyatuan persepsi, mencapai kesepakatan bersama, dan mendorong tindakan kolektif dalam penataan sektor tambak udang yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dialog yang Setara dan Terbuka

Konvergensi model menempatkan pemerintah dan masyarakat pada posisi yang setara dalam dialog kebijakan. Dialog telah dipraktekkan dalam seluruh bidang di dunia (Von Peter et al., 2019). Proses ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan perspektif, masukan, dan kebutuhan mereka secara langsung, sementara pemerintah mendengarkan dan merespons dengan keterbukaan. Dialog ini dapat mengurangi ketidakpercayaan dan resistensi masyarakat terhadap kebijakan yang mungkin tidak sepenuhnya mereka pahami atau setuju. Prinsip dasar dialog setara dalam model konvergensi diantaranya *Kesetaraan dalam partisipasi*: Setiap pihak memiliki kedudukan yang sama untuk berbicara dan didengar tanpa hierarki yang membatasi. *Keterbukaan pemerintah*: Pemerintah berkomitmen untuk mendengar masukan dan kritik dari masyarakat, mengurangi sikap defensif, dan menempatkan diri sebagai bagian dari solusi. *Transparansi informasi*: Kedua pihak, terutama pemerintah, harus menyediakan akses informasi yang memadai dan mudah dipahami agar masyarakat dapat ikut serta secara efektif.

“Dalam proses perumusan kebijakan petani tambak udang memang penting untuk dimulai dengan berdialog supaya semua pihak dapat memahami tujuan dan manfaatnya (Informan 6)”

“Kita sudah berdialog dengan masyarakat untuk mengetahui aspirasi mereka (Informan 2)”

Dialog yang setara dan terbuka adalah komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, di mana kedua belah pihak memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pandangan, masukan, dan kebutuhan masing-masing. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai pendengar dan fasilitator, sementara masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan harapan mereka. Dialog terbuka merupakan elemen utama dalam menciptakan pemahaman yang mendalam (Von Peter et al., 2021).

Manfaat dialog yang setara dan terbuka diantaranya *mengurangi ketidakpercayaan*: Dengan adanya dialog yang setara, masyarakat dapat merasa bahwa suara mereka dihargai, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah dapat meningkat. *Mengurangi resistensi terhadap Kebijakan*: Ketika masyarakat memahami alasan dan urgensi suatu kebijakan melalui dialog, resistensi atau penolakan mereka cenderung berkurang, karena mereka merasa dilibatkan dalam proses. *Kebijakan yang lebih inklusif*: Melalui dialog yang terbuka, pemerintah dapat memperoleh berbagai perspektif langsung dari masyarakat, yang bisa mencakup aspek-aspek spesifik yang mungkin tidak terlihat dari sudut pandang pemerintah.

Implementasi dialog yang setara dan terbuka dalam konvergensi kebijakan implementasi dialog ini biasanya dilakukan melalui forum-forum konsultatif, musyawarah, atau diskusi terbuka di mana perwakilan masyarakat dari berbagai latar belakang diundang untuk berpartisipasi. Dalam konteks *policy formulation* bagi nelayan atau petambak udang, misalnya, forum ini bisa mempertemukan pemerintah dengan para petambak secara langsung, memberikan mereka ruang untuk menyuarakan tantangan spesifik yang mereka hadapi di lapangan. Pemerintah mendengarkan dan mencatat poin-poin penting ini sebagai bahan pertimbangan untuk kebijakan yang akan dirumuskan.

Dialog yang setara dan terbuka merupakan sarana bagi pemerintah dan masyarakat untuk terlibat dalam proses konvergensi kebijakan yang lebih manusiawi dan responsif. Implementasinya membutuhkan komitmen dari kedua belah pihak untuk saling mendengar, memahami, dan merespons secara konstruktif. Melalui proses ini, kebijakan yang dirumuskan diharapkan mampu membawa dampak positif yang lebih berkelanjutan dan mengakar pada kebutuhan nyata masyarakat.

Penyatuan Persepsi

Dalam proses konvergensi, pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk mencapai pemahaman yang serupa terhadap masalah atau kebutuhan yang ada. Proses ini perlu dilakukan dalam rangka untuk menciptakan konsensus dalam merumuskan dan memutuskan suatu kebijakan (Wang & Ran, 2023). Penyatuan persepsi ini sangat penting karena membantu pemerintah melihat isu dari sudut pandang masyarakat, sehingga kebijakan yang dirumuskan lebih kontekstual dan aplikatif. Misalnya, dalam konteks penataan tambak udang di wilayah pesisir, masyarakat yang mengelola tambak dapat menyampaikan tantangan yang mereka alami langsung kepada pemerintah. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk menyusun kebijakan yang tidak hanya berdasarkan data teknis, tetapi juga memperhitungkan kenyataan di lapangan.

Penyatuan persepsi merujuk pada upaya kolaboratif untuk menyelaraskan pandangan antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai penerima dampak kebijakan. Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya mengandalkan data dan analisis teknis, tetapi juga memperhatikan perspektif, pengalaman, dan kondisi nyata yang dialami oleh masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan dapat lebih kontekstual dan aplikatif.

“Dari awal kita sadari pentingnya penyatuan persepsi dari semua kalangan untuk memastikan semua pihak dapat memiliki pandangan yang sama dan setara (Informan 3)”

Proses ini dimulai dengan pertemuan dan diskusi antara pemerintah dan masyarakat untuk saling bertukar informasi dan pandangan mengenai isu tertentu. Pada tahap ini, pemerintah perlu mengumpulkan data teknis, sedangkan masyarakat menyampaikan pengalaman langsung mereka. Penyatuan persepsi akan semakin efektif jika diikuti dengan *field visit* atau observasi lapangan, di mana pemerintah dapat melihat kondisi nyata secara langsung.

Dalam konteks penataan tambak udang di pesisir, penyatuan persepsi bisa dimulai dengan mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi masyarakat, seperti masalah kualitas air, biaya produksi, akses pasar, atau kerusakan lingkungan. Misalnya, pemerintah mungkin memiliki data teknis mengenai polusi air yang berasal dari aktivitas tambak. Di sisi lain, masyarakat mungkin melihat bahwa polusi ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas pengolahan limbah atau peraturan yang kurang jelas. Dengan menyatukan persepsi ini, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tidak hanya melarang praktik yang merusak, tetapi juga menyediakan dukungan teknis atau insentif bagi para petambak untuk menjaga lingkungan.

Penerapan penyatuan persepsi dapat dilakukan melalui *forum musyawarah* yang melibatkan pemerintah daerah, perwakilan nelayan, petambak udang, lembaga riset, dan pakar lingkungan. Pada pertemuan ini, masyarakat petambak bisa langsung menyampaikan kendala yang dihadapi, seperti mahalnya teknologi ramah lingkungan atau permasalahan perizinan. Pemerintah mendengarkan dan menanggapi dengan memikirkan solusi yang realistis berdasarkan data teknis yang dimiliki, sehingga kebijakan yang dirumuskan lebih menyatu dengan kebutuhan masyarakat.

Penyatuan persepsi dalam model konvergensi kebijakan adalah upaya untuk mengharmonisasi pemahaman antara pemerintah dan masyarakat. Dengan cara ini, kebijakan yang dihasilkan diharapkan bisa lebih aplikatif, relevan, dan didukung oleh masyarakat. Proses ini menciptakan dialog yang sehat dan memungkinkan pemerintah memahami masalah dari kacamata masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih kuat dalam implementasi dan dampak jangka panjangnya.

Partisipasi Aktif

Melalui pendekatan konvergensi, masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi adalah tindakan orang-orang yang terlibat dalam keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka (Thorpe & Gaventa, 2020). Keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahapan kebijakan (dari perumusan hingga implementasi) menciptakan rasa memiliki (*ownership*) dan tanggung jawab terhadap kebijakan yang dihasilkan. Partisipasi aktif ini juga dapat mengurangi konflik di masa mendatang karena masyarakat merasa suaranya didengar dan diperhitungkan.

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan adalah elemen fundamental dalam model konvergensi kebijakan yang memungkinkan kebijakan lebih efektif dan diterima oleh masyarakat. Melalui keterlibatan ini, masyarakat memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap kebijakan, serta mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul di kemudian hari. Proses ini membantu menciptakan kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan yang berdasar pada kolaborasi erat antara pemerintah dan masyarakat.

“Kami sebagai pemerintah terus mendorong keterlibatan masyarakat pada seluruh proses tahapan (Informan 1)”

“Memang kami menyadari masih banyak kendala yang di hadapi terutama berkenaan dengan tingkat pengetahuan masyarakat (informan 3)”

Peluang partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan diantaranya meningkatkan relevansi dan efektivitas kebijakan dimana pelibatan masyarakat dalam setiap tahap pengambilan keputusan memungkinkan kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. Masyarakat memiliki wawasan mendalam tentang isu dan tantangan yang mereka hadapi sehari-hari, yang mungkin tidak selalu bisa disimpulkan hanya dari data teknis. Dengan informasi langsung ini, kebijakan yang dirumuskan menjadi lebih relevan dan memiliki dampak nyata.

Meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab, Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar dan dipertimbangkan, mereka akan memiliki rasa kepemilikan atas kebijakan tersebut. Misalnya, dalam kebijakan lingkungan atau pengelolaan sumber daya, masyarakat yang terlibat dalam perumusan aturan akan lebih termotivasi untuk mengikuti aturan karena mereka merasa memiliki tanggung jawab dalam implementasinya.

Mengurangi potensi konflik dan penolakan, Partisipasi aktif masyarakat menciptakan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, yang mengurangi potensi miskomunikasi dan kesalahpahaman. Masyarakat yang merasa didengar cenderung lebih terbuka untuk menerima hasil kebijakan, meskipun tidak sepenuhnya sesuai harapan mereka. Akibatnya, potensi konflik dan penolakan terhadap kebijakan dapat diminimalisir, karena mereka memahami alasan dan proses di balik kebijakan tersebut.

Memperkuat kapasitas dan kesadaran masyarakat, Melalui partisipasi aktif, masyarakat juga dapat belajar tentang mekanisme kebijakan publik, prosedur pengambilan keputusan, serta isu-isu yang terkait dengan kebijakan tersebut. Partisipasi yang terus berlangsung akan meningkatkan kapasitas dan pemahaman masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran mereka terhadap peran penting yang mereka miliki dalam keberhasilan kebijakan publik.

Sementara itu tantangan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan karena disebabkan oleh beberapa hal diantaranya Ketimpangan Pengetahuan dan Pemahaman. Tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang memadai mengenai isu teknis atau prosedur kebijakan. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan dalam tingkat pemahaman dan kualitas masukan yang diberikan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah menghadapi tantangan untuk menyederhanakan bahasa dan menyediakan edukasi yang diperlukan agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi secara efektif.

Keterbatasan waktu dan sumber daya, Proses partisipatif membutuhkan waktu, anggaran, dan sumber daya manusia yang cukup untuk memastikan keterlibatan masyarakat dapat terwujud secara maksimal. Mengatur pertemuan, melakukan survei, mengadakan diskusi publik, atau forum musyawarah sering kali memerlukan investasi waktu yang tidak sedikit. Pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk memastikan proses partisipasi berjalan dengan baik.

Perbedaan kepentingan dan pandangan antara Masyarakat dan Pemerintah, Partisipasi masyarakat juga bisa menimbulkan konflik kepentingan, baik antara kelompok dalam masyarakat itu sendiri maupun antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini terutama terjadi apabila kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah bertentangan dengan kepentingan sebagian masyarakat. Pemerintah perlu memiliki kemampuan untuk menjadi penengah, memfasilitasi dialog yang inklusif, dan fokus pada tujuan bersama yang lebih luas.

Keterbatasan infrastruktur dan akses informasi, Tidak semua masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur atau informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi. Di beberapa daerah,

keterbatasan ini menjadi hambatan besar dalam upaya untuk mengumpulkan pandangan dari semua lapisan masyarakat. Pemerintah perlu mengembangkan strategi komunikasi yang lebih inklusif, termasuk memanfaatkan teknologi dan jaringan lokal yang ada.

KESIMPULAN

Konvergensi model adalah pendekatan yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama secara harmonis dengan mengedepankan pemahaman dan penghormatan terhadap peran serta kepentingan masing-masing. Dalam konteks kebijakan publik, konvergensi ini menciptakan sinergi yang meningkatkan relevansi, keberlanjutan, dan efektivitas kebijakan melalui proses kolaboratif. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat ini berfungsi untuk memperkuat pencapaian tujuan bersama, berdasarkan pemahaman dan komitmen kolektif yang terbentuk melalui partisipasi aktif masyarakat di setiap tahap kebijakan, mulai dari perumusan hingga implementasi.

Dalam sektor-sektor tambak udang di wilayah pesisir, konvergensi dapat menjadi strategi penting dalam menyatukan berbagai kepentingan dan mencapai solusi inklusif serta berkelanjutan. Sinergi yang dihasilkan dari pendekatan ini membantu meminimalkan konflik, meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan, dan menciptakan kebijakan yang lebih aplikatif serta sesuai dengan kebutuhan lapangan. Tahap-tahap penting dalam konvergensi untuk mencapai sinergi antara pemerintah dan masyarakat diantaranya seperti berikut.

Tahap pemahaman awal dimana pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengidentifikasi isu, masalah, atau kebutuhan yang ada di lapangan. Dalam hal tambak udang, misalnya, masyarakat pesisir dapat mengemukakan tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam pengelolaan tambak, seperti kualitas air, dampak lingkungan, dan akses pasar. Pemerintah, di sisi lain, memetakan tujuan kebijakan yang ingin dicapai, seperti menjaga ekosistem pesisir atau meningkatkan produksi sektor perikanan. Tahap pemahaman awal ini sangat penting agar kedua belah pihak memiliki gambaran yang sama mengenai isu yang akan diatasi.

Tahap berikutnya berupa penciptaan ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Dialog ini memungkinkan pemerintah untuk mendengarkan pandangan, kebutuhan, dan harapan masyarakat secara langsung, sementara masyarakat dapat memahami alasan dan pertimbangan yang diambil pemerintah. Tahap dialog ini membantu menghilangkan kesalahpahaman dan membangun kepercayaan serta transparansi. Dengan demikian, masyarakat akan lebih siap menerima kebijakan yang dihasilkan karena mereka merasa terlibat dalam proses pembuatannya.

Setelah dialog, langkah selanjutnya adalah menyatukan persepsi dan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat. Penyatuan persepsi ini penting agar kedua belah pihak memiliki pandangan yang sama mengenai masalah, tujuan, dan pendekatan yang akan diambil. Dalam konteks tambak udang, misalnya, pemerintah dan masyarakat bisa menyepakati bahwa perlindungan ekosistem dan peningkatan kesejahteraan petambak adalah dua tujuan utama yang harus dicapai melalui kebijakan yang berimbang.

Terakhir ialah partisipasi aktif yang mana melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat memberikan masukan tentang langkah-langkah teknis yang lebih relevan dan dapat diterapkan di lapangan, sementara pemerintah memberikan arahan berdasarkan data dan regulasi yang ada. Kebijakan yang dihasilkan dari tahap ini menjadi lebih aplikatif dan memiliki kemungkinan lebih besar untuk diterima dan diterapkan secara efektif oleh masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini berjalan dengan lancar dan dapat berkontribusi secara akademik melalui karya publikasi. Oleh karena itu, tim peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada Universitas Wiraraja sebagai pemberi dana Internal Tahun 2024 dan beberapa pihak yang memberikan dukungan secara tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abad-Segura E, González-Zamar MD, López-Meneses E, Vázquez-Cano E. (2020). Financial Technology: Review of trends, approaches and management. *Mathematics*. 8(6):1–36.
- Busetto, Loraine. Wick, Wolfgang. Gumbinger, Christoph. (2020). How to use and assess qualitative research methods. 2:14 <https://doi.org/10.1186/s42466-020-00059-z>. *Neurological Research and Practice*
- Baarsch F, Granadillos JR, Hare W, Knaus M, Krapp M, Schaeffer M. (2020). The impact of climate change on incomes and convergence in Africa. *World Dev* [Internet]. 126:104699. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104699>
- Hidayatillah Y. (2017). Dampak Sosial Industrialisasi Tambak Udang terhadap Lingkungan di Desa Andulang Kabupaten Sumenep. *J Teor dan Praksis Pembelajaran IPS*.2(2):72–8.
- Isman H, Rupiwardani I, Sari D. (2022). Gambaran Pencemaran Limbah Cair Industri Tambak Udang Kualitas Air Laut di Pesisir Pantai Lombeng. *Jurnal Pendidik dan Konseling*. 4(3):1349–58.
- Kim DW, Choi JY, Han KH. Risk management-based security evaluation model for telemedicine systems. *BMC Med Inform Decis Mak*. 2020;20(1):1–14.
- Lin F, Li D, Zhang W, Shi D, Jiao Y, Chen Q, (2024). Multi-modal knowledge graph inference via media convergence and logic rule. *CAAI Trans Intell Technol*. 9(1):211–21.
- Murthado DA. (2021). Dampak Industrialisasi Tambak Udang Terhadap Lingkungan Di Desa Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep [Internet]. Vol. 2, *Jurnal Setia Pancasila*. 1–7 p. Available from: <https://e-jurnal.stkipgrisumenep.ac.id/index.php/JSP%0AIMPACT>
- Maxwell. JA. (2020). Why Qualitative methods Are Necessary for Generalization. *Qual Psychology* [Internet]. 8 (1). Available from: https://www.researchgate.net/publication/341719182_Why_qualitative_methods_are_necessary_for_generalization
- Moretti F, van Vliet L, Bensing J, Deledda G, Mazzi M, Rimondini M,. (2011). A standardized approach to qualitative content analysis of focus group discussions from different countries. *Patient Educ Couns* [Internet]. 82(3):420–8. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.2011.01.005>
- Puri S, Devkota N, Mahato S, Paudel UR. (2022). A Study on Determinants of Managerial Communication in Hospitality Industry in Kathmandu Valley: A Structural Equation Modelling Analysis. *Journal Tour Adventure*. 5(1):23–43.
- Rogers EM, Kincaid DL. (1981). *Communication Networks: Toward a New Paradigm for Research*. New York: The Free Press.
- Ruslin, Saepudin Mashuri Email: Mashuri, Saepudin. Rasak, Muhammad Sarib Abdul. Alhabsyi, Firdiansyah. Syam, Hijrah. (2022) Semi-structured Interview: A Methodological Reflection on the Development of a Qualitative Research Instrument in Educational Studies. 22-29. *IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME)*
- Singh B. Federated (2023). learning for envision future trajectory smart transport system for climate preservation and smart green planet: Insights into global governance and SDG-9 (Industry, Innovation and Infrastructure). *Natl Journal Environ Law*. 6(2):6–17.
- Saryani, Handayani I, Agustina R. (2022). Starting a Digital Business: Being a Millennial Entrepreneur Innovating. *Startupreneur Bus Digit (SABDA Journal)*. 1(2):126–33.
- Shofa I, Khamidah K. (2023). Instrumen Green Sukuk Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur. 10(2).
- Thorpe, Jodie & Gaventa, John. (2020). Democratising Economic Power: The Potential for Meaningful Participation in Economic Governance and Decision-Making. *Institute of Development Studies. IDS WORKING PAPER Volume 2020 No 535*.
- Von Peter S, Aderhold V, Cubellis L, Bergström T, Stastny P, Seikkula J and Puras D (2019) Open

Dialogue as a Human Rights-Aligned Approach. *Front. Psychiatry* 10:387. doi: 10.3389/fpsy.2019.00387.

Von Peter S, Bergstrøm T, Nenoff-Herchenbach I, Hopfenbeck MS, Pocobello R, Aderhold V, Alvarez-Monjaras M, Seikkula J and Heumann K (2021) Dialogue as a Response to the Psychiatrization of Society? Potentials of the Open Dialogue Approach. *Front. Sociol.* 6:806437. doi: 10.3389/fsoc.2021.806437.

Wang Huanming & Ran Bing, (2021). Network governance and collaborative governance: a thematic analysis on their similarities, differences, and entanglements. *Public Management Review*, 25:6, 1187-1211, DOI: 10.1080/14719037.2021.2011389

Wardana A. (2020). Perspektif Hukum Kebijakan Alih Fungsi Tanah Pertanian Di Kabupaten Sumenep Menjadi Tambak Udang. *Arena Huk.* 13(02):278–99.

Zhong M, Liu Y, Xu Y, Zhu C, Zeng M. (2022). DIALOG LM : Pre-trained Model for Long Dialogue Understanding and Summarization. *The Thirty-Sixth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-22)* (3).